

**ANALISIS KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH DI KOTA METRO
(STUDI DI TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH (TPAS) KOTA METRO**

Mirnawati

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Stisipol Dharma Wacana Metro, Lampung
Jalan Kenanga No.3 Kelurahan Mulyojati 16-c, Metro 341125, Lampung
mirnawati@stisipoldharmawacana.ac.id

ABSTRACT. *The purpose of this study are analysis of the performance of Waste in Metro City Sanitation Unit, and the application of the principles of Good Governance in UPT Cleanliness Metro City. The results showed Performance Of sewage treatment UPT Cleanliness Metro City quite well, evidenced by the hygiene conditions of the main road, and achievement, able to earn trophies Verse, a Clean City, increasing the results of revenue (PAD) from the levy cleanliness of Metro City, although it has not been thorough City area Metro accessible because of his lack of the number of worker / clerk pengakut garbage and facilities are inadequate, for the adoption of the principles of Good Governance, UPT Cleanliness Metro apply the principle of participation that the increased awareness and public confidence in the UPT Cleanliness Metro City with the volume of waste generated Metro city is quite high, it terlihat of incoming data to Landfill Waste (TPAS) in Karangrejo Metro Timur reached 210-225 cubic, public participation in the separation of household waste organic and inorganic, and physical activity / work devotion.*

Keywords: performance analysis, sewage treatment, implementation of good governance,

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Governance di UPT Kebersihan Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Dari pengolahan sampah UPT Kebersihan Kota Metro cukup baik, terbukti dengan kondisi kebersihan jalan utama, dan berprestasi, mampu mendapat piala Adipura, sebagai Kota Bersih, meningkatnya hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan Kota Metro, walaupun belum secara menyeluruh wilayah Kota Metro dapat terjangkau karena kurangnya jumlah Pekerja/ petugas pengakut sampah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, untuk Penerapan prinsip-prinsip Good Governance, UPT Kebersihan Kota Metro menerapkan prinsip partisipasi yaitu meningkatnya kesadaran serta kepercayaan masyarakat kepada UPT Kebersihan Kota Metro dengan volume sampah yang di hasilkan kota Metro cukup tinggi, hal itu terlihat dari data masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Karangrejo Metro Timur mencapai 210-225 kubik, peran serta masyarakat dalam pemisahan sampah rumah tangga organik dan anorganik serta kegiatan fisik/kerja bakti.

Kata kunci: analisis kinerja, pengelolaan sampah, penerapan prinsip Good Governance, kinerja pengolahan sampah

PENDAHULUAN

Era globalisasi mendorong negara-negara demokratis di dunia untuk mengadakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan. Penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai-nilai *good governance* akan membentuk pemerintahan yang “ideal” sebagai negara demokrasi substansial. Fenomena demokrasi substansial sendiri ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan adanya interdependensi antar negara dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya yang mengaburkan batas-batas geografis negara.

Konseptualisasi *Good Governance* yang terus berkembang menekankan adanya nilai-nilai yang dijalankan. Nilai tersebut berupa *voice and accountability (VA)*, *political stability and absence of violence (PS)*, *government effectiveness (GE)*, *regulatory quality (RQ)*, *rule of law (RL)* dan *control of corruption (CC)*. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi inti dari setiap landasarn kebijakan yang dijalankan oleh setiap negara demokratis. Idealnya, keenam nilai tersebut akan ada pada diri setiap aktor institusional. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap kebijakan yang dihasilkan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah pemerintahan. Nilai-nilai tersebut kemudian yang menjadi dasar kebijakan Dinas Kebersihan Kota Metro yang diterapkan dalam kinerja pengolahan sampah. Adapun permasalahan yang hendak diselesaikan dengan nilai-nilai diatas adalah pengelolaan sampah yang ada di Kota Metro

Hal ini disebabkan usaha mengurangi volume sampah tidak sebanding dengan laju produksi dan tata kelola yang baik dari hulu hingga hilir. Fenomena pengelolaan sampah merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Menghidupkan kesadaran pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat menjadi tantangan bagi negara berkembang. Pemerintah Indonesia mengatur tentang tata kelola sampah dalam UU No.18 Tahun 2008 yang mendefinisikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan sifatnya sampah dibagi atas dua bagian besar yaitu sampah organik dan anorganik. Sehingga keberadaan sampah semakin menumpuk di setiap penjuru lingkungan perkotaan. Dengan volume timbunan sampah berlebihan menyebabkan kegiatan pengangkutan dan mengolah ke TPA melebihi kapasitas yang ada. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai dampak negatif dari sampah, baik dampak langsung maupun tidak langsung bagi penduduk di lingkungan perkotaan, khususnya yang berdekatan dengan lokasi penumpukan sampah. Dampak langsung adalah timbulnya berbagai penyakit menular, bau yang tidak sedap, serta mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan. Adapun dampak tidak langsungnya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air selokan dan sungai karena terhalang timbunan sampah.

Kota Metro merupakan salah satu Kota di Indonesia yang sudah memiliki tata cara pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip *good governace* yang cukup baik, meskipun secara umum, kondisi di Kota Metro masih banyak terdapat timbunan sampah yang berada di bahu jalan atau di lahan kosong tanpa

wadah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman dan tidak sehat seperti menyebarkan bau yang tidak sehat, rentan terhadap penyakit, serta pemandangan yang tidak indah.

Dinas Kebersihan Kota Metro merupakan dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebersihan dan sampah yang ada di Kota Metro. Dinas Kebersihan Kota Metro juga turut menjalankan *good governance* (prinsip partisipasi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi) pada tata kelola sampah di Kota Metro hal ini dilakukan guna menghasilkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi yang mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan semua *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Namun dalam pelaksanaannya hal ini masih belum dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Unit Pengelola Teknis (UPT) Kebersihan telah melakukan berbagai pembenahan fasilitas demi meningkatkan citra Dinas Kebersihan Kota Metro. Akan tetapi perbaikan fasilitas tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena kurangnya sarana persampahan dan masih terbatasnya peralatan seperti kontainer, dan truk pengangkutan hal ini berimbas pada pola pengangkutan sampah yang menjadi tidak efektif serta menyebabkan berkurangnya jangkauan layanan dan biaya operasional pengangkutan.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara, 2006: 6). Dengan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan upaya untuk menjalankan

pemerintahan dengan seimbang dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan meliputi akuntabilitas, transparansi, kesetaraan supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien dan berdaya saing.

Meskipun dalam praktiknya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam beberapa kasus tidak dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola sampah yang ada di kota lain. Hal ini dikarenakan prinsip yang diterapkan tidak melibatkan masyarakat dalam proses tata kelola sampah yang dilaksanakan. Dalam prinsip tata kelola sampah yang baik menurut Sri Bebasari dari *Indonesian Waste Forum* (IWF) terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan masalah sampah. Aspek tersebut antara lain aspek hukum, institusi, peran serta masyarakat dan teknologi. Dinas Kebersihan Kota Metro telah menerapkan aspek hukum dan institusi dengan prinsip *good governance* yang cukup baik dalam tata kelola sampah di Kota Metro, namun belum dapat melibatkan peran serta masyarakat dan teknologi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui kesimpulan yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami hasil dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* di UPT Kebersihan Kota Metro. Adapun pemaparan hasil penelitian akan dilakukan dengan cara deskriptif. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip *good*

governance di UPT Kebersihan Kota Metro.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan tiga tahapan teknik analisis data yang disarankan oleh Miles dan Huberman. Pada tahap pertama dalam analisis data akan dilakukan reduksi data. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data. Selanjutnya merupakan proses terakhir berupa analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola sampah di Indonesia telah diatur dalam UU No.18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam undang-undang tersebut dijabarkan dalam tata kelola sampah yang dijalankan pemerintah bertugas untuk memumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, mendorong penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.

Kinerja pengelolaan sampah sebagian besar masih kurang baik dan mendekati cukup baik. Kualitas pengelolaan sampah maksimal yang dicapai adalah cukup baik, yaitu kondisi kebersihan jalan utama, penempatan TPS atau kontainer, kondisi alat pengumpul sampah, kondisi alat pengangkutan sampah dan kualitas petugas kebersihan. Hasil tersebut didapatkan dari pengamatan di beberapa jalan protokol Kota Metro.

Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan

Dalam mewujudkan *good governance*, UPT Kebersihan harus memiliki strategi agar dapat menyesuaikan dengan hambatan dan tantangan yang akan di hadapi. Aspek yang harus dipenuhi dalam mencapai visi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, pendanaan atau finansial, infrastruktur, Informasi dan Teknologi (IT) yang bersifat transparan dan akuntabel, berpegang teguh pada visi, koordinasi yang baik dan berkesinambungan dari semua lini yang ada, memiliki pemimpin dan jajarannya yang mampu saling bekerjasama antara satu dengan lainnya dan paham akan tugas dan fungsinya masing-masing, membangun komitmen bersama, dan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Berikut merupakan hasil penelitian penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada UPT Kebersihan Kota Metro.

a. Prinsip efektif dan efisiensi

Sebelumnya sistem dan metode pembuangan sampah yang dipakai adalah *Open Dumping* atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah yang dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Cara ini tidak direkomendasikan lagi mengingat banyaknya potensi pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan.

Alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur-ulang semua limbah yang

dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam. Untuk mencapai hal tersebut, ada tiga asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan tiga prinsip-prinsip baru. Dari pada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat, minimisasi sampah harus dijadikan prioritas utama. Perubahan sistem pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 sudah selayaknya mulai disikapi oleh Pemkot Metro.

Dengan penerbitan Undang-undang ini, Pemkot dapat merancang peraturan daerah yang mendukung implementasi tata kelola sampah, mulai dari sumber penghasil hingga TPA. Dinas Kebersihan dapat merintis usaha pengelolaan sampah berbasis komunitas, yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan di tingkat rumah tangga dan komunitas / kelompok (bank sampah).

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada UPT Kebersihan, Kinerja pengolahan sampah yang dijalankan selama ini sudah berjalan baik dengan menempatkan tong tong sampah di tempat tempat umum, walau masih banyak terjadi kesalahan salah memasukan sampah pada tempatnya, dikarenakan kurangnya sosialisasi cara membuang sampah pada tempatnya. sehingga terjadi tercampurnya antara sampah organik (sampah basah) dedaunan dan yang mudah busuk dan anorganik (sampah kering) botol, kaleng, dan kertas. Sampah organik tempatnya tong warna hijau sedang anorganik tong warna kuning, sampah yang tercampur seperti ini dapat menghambat proses pemisahan dan pengolahan sampah maka untuk mengangkut sampah di Kota Metro Dinas Tata Kota dan Pariwisata (Distakopar) melalui UPT kebersihan mengandalkan 12

dump truck dan 6 amrol yang ditinggalkan di tempat pembuangan sementara (TPS) dan 7 unit bentor (becak montor) di bawa ke TPAS

b. Prinsip Partisipasi

Penerapan prinsip partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada UPT Kebersihan Kota Metro dengan volume sampah yang di hasilkan kota Metro cukup tinggi, hal itu terlihat dari data masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di karang rejo mencapai 210-225 kubik.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro yaitu dapat di lihat dari segi pekerjaan dan lamanya tinggal. Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktivitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan seseorang berhubungan dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian dan lingkungan sekitar, pendapatan, wawasan, dan sedikit banyak mempengaruhi pola berpikir seseorang, Semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka kesempatan berperan serta semakin kecil.

Lamanya tinggal memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk peran serta masyarakat dalam proses keterlibatan warga dalam pertemuan, kegiatan fisik/kerja bakti. Semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu Daerah pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan psikologisnya sehingga dapat merangsang rasa memiliki yang mendalam yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas yang ada. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal, semakin

tinggi ikatan psikologis dengan lingkungannya yang berpengaruh pada besarnya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama.

Kendala dalam Penerapan Prinsip Good Governance pada UPT Kebersihan Kota Metro

a. Kendala Sumber daya Manusia

Kendala yang pertama dalam penerapan prinsip *good governance* pada UPT Dinas Kebersihan Kota Metro yaitu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan unsur yang cukup penting dalam sebuah lembaga, karena sumber daya manusia merupakan penggerak dari roda-roda lembaga itu sendiri dan sebagai pencetus inovasi yang memiliki ide-ide pembaharuan untuk menguatkan lembaga dan kepentingan program. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah lembaga menjadi salah satu faktor penentu terhadap kinerjanya.

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM). Di dalam Renstra Dinas Tata Kota dan Pariwisata harus menerapkan Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsifitas dan sebagainya. Namun pada tahap pelaksanaannya, Dinas Tatakota dan Pariwisata masih belum dapat melaksanakan prinsip-prinsip tersebut disemua unit kerja petugas kebersihan. Sebab SDM yang dimiliki UPT Kebersihan belum siap secara menyeluruh untuk menjalankan prinsip tersebut, tentu saja hal ini kembali lagi ke individunya masing-masing belum sepenuhnya merupakan perwujudan dari prinsip *Good Governance* yang ada, karena masih belum bersifat menyeluruh.

Sedikitnya jumlah pekerja kebersihan tidak sebanding dengan volume sampah yang ada dikota Metro serta

profesionalisme pekerja dalam pekerjaannya, dimana banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah disertai dengan tingkat kesejahteraan pekerja juga masih rendah yaitu gaji pekerja/petugas pengangkutan sampah masih minim, dalam kondisi seperti itu maka UPT Kebersihan Kota Metro masih kesulitan untuk mencapai visinya yaitu: ***"Menjadikan organisasi yang profesional dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan lingkungan"***.

Kenyataan yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa finansial merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh UPT Kebersihan dalam mencapai visi instansi. Keterbatasan alokasi anggaran APBN menjadi alasan tersendiri bagi UPT Kebersihan dalam pengelolaan sampah, sehingga program serta pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa gedung di UPT Kebersihan yang terbengkalai dan belum dilanjutkan proses penyelesaiannya hingga saat ini. Diantaranya yaitu terbengkalainya pembangunan dua gedung yang telah dibangun sejak lama. Hingga saat ini, dua gedung yang memiliki ruangan yang cukup besar belum terlihat adanya perkembangan dari keberlanjutan pembangunan gedung tersebut, dan yang terlihat dari dua gedung yang terbengkalai ini hanyalah dimanfaatkan oleh petugas kebersihan sebagai tempat kosong atau gudang. Kenyataan yang dialami oleh UPT Kebersihan yang pendanaanya dibiayai oleh pemerintah, tidak menjadi jaminan lebih unggul dalam mengembangkan kebersihan lingkungan.

Dengan demikian persoalan mendasar yang menentukan unggul tidaknya instansi

sangat tergantung pada kemampuan instansi untuk menciptakan, memperluas, dan menggali sumber-sumber dana baru, serta mengelola dana untuk kepentingan pasukan kebersihan secara efektif dan efisien. Persoalan dana merupakan persoalan klasik dalam suatu organisasi, namun dalam perkembangan modern saat ini sebetulnya persoalan dana dapat diatasi jika suatu organisasi di atur atau di manajemen secara professional. UPT Kebersihan sebagai instansi memiliki potensi untuk menggalang dana secara maksimal guna mendukung kegiatannya melalui pola manajemen pengetahuan. Dalam pola ini, Pengetahuan kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan semua orang sepanjang hayat. Ilmu pengetahuan akan dikejar dan dicari oleh manusia untuk kepentingannya dalam menata kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, permasalahan sumber daya manusia muncul dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di UPT Kebersihan Kota Metro. Dari hasil observasi yang dilakukan, kendala sumberdaya manusia (SDM) di UPT Kebersihan Kota Metro pada dasarnya sangat dipengaruhi tiga aspek:

- **Aspek Kelembagaan**

Berdasarkan observasi yang dilakukan, aspek kelembagaan sangat berpengaruh dalam menciptakan kebersihan Kota Metro, apabila antara operator dan regulator masih menjadi satu tentu tidak akan efesien karena lembaga tersebut harus memikirkan satu peraturan namun lembaga tersebut juga harus bekerja menjalankan peraturan yang ada

- **Aspek Pembiayaan**

Selanjutnya dari aspek pembiayaan. Dari hasil obsevasi yang dilakukan, diketahui bahwa aspek pembiayaan

sangat berpengaruh, karena apabila anggaran kecil bagaimana untuk mencukupi biaya operasional kendaraan pengangkut sampah dan alat berat lain. Tarif pada sampah harusnya berdasarkan perhitungan dan pendataan.

- **Aspek Peraturan**

Peraturan tentang kebersihan di atur oleh UU No.18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah dan peraturan pemerintah UU No.81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, karena dengan adanya peraturan ini sebagai rambu-rambu bagi masyarakat untuk tidak bersikap semaunya, namun dalam menjalankan peraturan tidak hanya dituntut untuk masyarakat biasa saja tetapi pemerintah juga harus ikut serta mentaati peraturan yang ada dan jika terbukti melanggar harus di beri sanksi tegas yang diatur dalam Perda No.8 tahun 2015.

Kendala Finansial

Pengembangan UPT Kebersihan tidak dapat dilepaskan dari pendanaan instansi. Pendanaan merupakan urat nadi instansi. Instansi yang memiliki dana memadai akan memudahkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Sebaliknya, bagi instansi yang kurang memiliki dana akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan kegiatan baik berupa lomba desa, lomba UKS Sekolah, dan kebersihan lingkungan

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Pemerintah Kota Metro untuk segera mungkin merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro, dan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum memadai, maka

stakeholder bisa mengatur dari hasil pungutan biaya masyarakat yang membuang sampah untuk bisa memenuhi sarana dan prasarana tersebut, misalnya dengan cara menyisihkan sedikit hasil pungutan biaya yang dikenakan oleh masyarakat untuk ditabung dan dimanfaatkan untuk membeli sarana dan prasarana .

Pemerintah Kota Metro segera menambah jumlah pekerja/petugas UPT Kebersihan Kota Metro mengingat jumlah pekerja/petugas kebersihan tidak sebanding dengan volume sampah di Kota Metro, tetapi yang amat penting peningkatan sumberdaya manusianya serta kesejahteraan bagi pekerja agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tercapainya visi UPT Dinas Kersihan Kota Metro, visinya yaitu: **"Menjadikan organisasi yang profesional dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan lingkungan"**.

Perlu ditingkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro, kepada UPT Kebersihan Kota Metro agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok Bank Sampah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Kepada UPT Kebersihan agar terus memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat Kelurahan Kota Metro agar lebih terorganisir dan juga dapat memfasilitasi warga dalam memasarkan kompos tidak hanya dimanfaatkan sendiri, tetapi sebaliknya mendapat tambahan bagi ibu-ibu rumah tangga dan memacu pemberdayaan masyarakat.

Perlunya meningkatkan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan ketrampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Kencana.
- Heriyanto, Anas. 2015. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajem*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta. UI Press.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udara, Arcan. Jakarta.
- Sallya, Rizka. 21014. *Kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Bandar Lampung Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal Di Provinsi*

- Lampung. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sari, Maria Agustini Permata. *Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Sampah*.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*. Yogyakarta.
- Tiara Wacana.
- Syahrani., Syakrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Lampung. Penerbit Lembaga Penelitian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

